

Pancasila dan keadilan hukum

Aulia Ainus Safina Qohrunnada Widodo

Program studi Psikologi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
e-mail: aulia.sofina@gmail.com

Kata Kunci:

pancasila, keadilan, hukum, sosial, penegakan

Keywords:

pancasila, justice, law, sosial, enforcement

ABSTRAK

Sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila memainkan peran penting dalam membangun sistem hukum Indonesia. Pancasila, sebagai ideologi negara, tidak hanya memberikan standar moral, tetapi juga mengarahkan praktik hukum untuk mewujudkan keadilan sosial. Landasan untuk penegakan hukum yang adil, merata, dan sesuai dengan prinsip kemanusiaan diberikan oleh prinsip-prinsip luhur Pancasila, termasuk keadilan prosedural dan substantif. Namun, beberapa hambatan menghadapi penerapan Pancasila dalam sistem hukum, seperti praktik korupsi, ketimpangan hukum, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat.

Artikel ini membahas peran Pancasila dalam membangun keadilan hukum di Indonesia dan upaya strategis untuk mengatasi masalah ini. Hasil menunjukkan bahwa pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat harus bekerja sama untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila untuk menciptakan sistem hukum yang adil dan berkeadilan.

ABSTRACT

As the foundation of the Unitary State of the Republic of Indonesia, Pancasila plays an important role in building the Indonesian legal system. Pancasila as a state ideology not only provides moral standards, but also directs legal practices to realize social justice. The basis for law enforcement that is fair, equitable, and in accordance with the principles of humanity is provided by the noble principles of Pancasila, including procedural and substantive justice. However, there are several obstacles in the implementation of Pancasila in the legal system, such as corruption practices, legal inequality, and low legal awareness of the community. This article discusses the role of Pancasila in building legal justice in Indonesia and strategic efforts to overcome these problems. The results show that the government, law enforcement officers, and the community must work together to implement the values of Pancasila to create a fair and just legal system.

Pendahuluan

Pancasila adalah dasar berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang lahir dari proses sejarah panjang yang penuh perjuangan. Sebagai ideologi negara, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai landasan normatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi juga sebagai pedoman penyelenggaraan hukum di Indonesia. Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang dianggap sebagai tolak ukur terciptanya kehidupan yang adil, makmur, dan harmonis di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Salah satu aspek yang sangat ditekankan dalam Pancasila adalah keadilan, baik dalam kehidupan sosial, politik, dan hukum. Keadilan hukum merupakan bagian penting dalam kehidupan berbangsa, karena hukum yang adil akan menjamin hak setiap individu dan menimbulkan rasa keadilan dalam masyarakat. Pancasila yang sila kelimanya berbunyi: "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" memberikan pedoman dan nasihat



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

tentang bagaimana menjaga keadilan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk sistem hukum. Artikel ini akan membahas tentang pengertian Pancasila sebagai dasar negara dan bagaimana peran Pancasila dalam mewujudkan keadilan hukum di Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, Hidayati (2021) menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila sangat penting sebagai pengarah dalam setiap proses penegakan hukum agar tetap berlandaskan moralitas dan keadilan sosial. Selain itu juga akan diuraikan tantangan-tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan keadilan hukum sesuai nilai-nilai Pancasila, serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki sistem hukum di Indonesia. Oleh karena itu, kami berharap artikel ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang hubungan antara Pancasila dan keadilan hukum, serta memberikan sumbangan pemikiran untuk mengembangkan sistem hukum Indonesia yang adil dan lebih berkeadilan.

Pembahasan

Pancasila

Pancasila merupakan dasar ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari lima sila yang penerapan hukum harus dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif saling berkaitan dan mempunyai makna yang mendalam. Kata “Pancasila” sendiri berasal dari bahasa Sansekerta yang terdiri dari dua kata, yaitu “Panca” yang berarti tahun dan “Sila” yang berarti asas atau dasar. Oleh karena itu, Pancasila dapat dipahami sebagai lima prinsip dasar yang menjadi dasar negara Indonesia. Lima sila tersebut adalah sebagai berikut: Iman kepada Tuhan Yang Maha Esa Sila pertama menekankan agar masyarakat Indonesia beriman dan berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Asas ini mengajarkan bahwa negara Indonesia mengakui keberadaan Tuhan dan menempatkan nilai-nilai spiritual dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemanusiaan yang adil dan beradab Prinsip kedua meliputi pentingnya menghormati martabat manusia dan memperlakukan orang lain dengan adil. Prinsip ini mengajak kita untuk menjalani kehidupan yang manusiawi, menghindari tindakan yang melanggar hak asasi manusia.

Indonesia Bersatu Sila ketiga menekankan pentingnya solidaritas dan persatuan bangsa Indonesia. Keberagaman yang ada di Indonesia harus dijadikan kekuatan untuk menjaga keutuhan negara, meski terdapat perbedaan suku, agama, ras, dan golongan. Demokrasi dalam Permusyawaratan/Representasi yang Dimotori Intelijen Prinsip keempat mengandung makna bahwa negara Indonesia menganut sistem demokrasi yang mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam pengambilan keputusan. Prinsip ini menekankan pentingnya kepemimpinan yang bijaksana dan ramah rakyat. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Prinsip kelima mencakup pentingnya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara harus hadir untuk menjamin kesejahteraan sosial seluruh rakyat, apapun asal usulnya.

Pancasila Ideologi Negara

berperan penting dalam pembentukan sistem hukum di Indonesia. Keadilan hukum yang dimaksud adalah penerapan hukum yang tidak hanya mengutamakan penegakan aturan semata, tetapi juga mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan

kesejahteraan sosial yang terkandung dalam Pancasila. Keadilan hukum harus mengedepankan pemerataan hak dan kewajiban, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam konteks Pancasila, keadilan hukum dapat dipahami melalui dua aspek utama, yaitu:

Keadilan Prosedural (Procedural Justice)

Keadilan ini berkaitan dengan proses dalam penerapan hukum yang harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan adil. Setiap individu harus diberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh perlindungan hukum tanpa diskriminasi. Proses hukum harus bebas dari penyalahgunaan kekuasaan dan tidak berpihak pada kelompok tertentu.

Keadilan Substantif (Substantive Justice)

Keadilan substantif menekankan pada hasil atau isi dari keputusan hukum yang diambil. Keputusan tersebut harus mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial, yaitu memberikan kesejahteraan dan hak yang setara bagi semua pihak. Dalam hal ini, Pancasila sebagai dasar negara memberikan arahan agar hasil keputusan hukum dapat menyejahterakan rakyat dan menghindari ketidakadilan sosial. Pancasila memberikan arah bagi sistem hukum Indonesia untuk tidak hanya berfokus pada penegakan aturan formal, tetapi juga memastikan bahwa hukum yang diterapkan berpihak pada keadilan sosial, mengutamakan kemanusiaan, serta menciptakan keselarasan dalam kehidupan bermasyarakat.

Implementasi Pancasila dalam Keadilan Hukum

Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam keadilan hukum dapat dilihat dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, antara lain:

Penyelenggaraan Negara yang Demokratis

Demokrasi yang diterapkan di Indonesia mengedepankan prinsip musyawarah dan mufakat dalam pengambilan keputusan, sehingga kebijakan negara lebih berpihak pada rakyat. Prinsip ini tercermin dalam sistem peradilan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan perlakuan yang adil terhadap semua warga negara.

Penegakan Hukum yang Adil dan Merata

Dalam sistem hukum Indonesia, penerapan hukum harus dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif. Semua warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sama tanpa membedakan status sosial, ekonomi, atau politik. Hal ini sesuai dengan pandangan Faizin (2022) yang menekankan bahwa keadilan hukum harus mencerminkan keseimbangan antara aturan formal dan kesejahteraan sosial masyarakat.

Pembangunan Ekonomi dan Sosial yang Berkeadilan

Pancasila mendorong terciptanya keadilan sosial, yang tercermin dalam upaya pembangunan ekonomi dan sosial yang merata. Negara bertanggung jawab dalam memastikan distribusi kekayaan yang adil dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

Pemberantasan Korupsi

Prinsip keadilan hukum juga menuntut pemberantasan korupsi sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan negara dan rakyat. Dalam hal ini, Pancasila mengingatkan kita untuk menegakkan keadilan dengan memperjuangkan kebenaran dan menghindari tindakan yang tidak adil. Yusuf (2020) mengungkapkan bahwa pemberantasan korupsi harus dibarengi dengan transformasi nilai hukum berbasis Pancasila agar tidak hanya represif, tetapi juga edukatif dan preventif.

Kesimpulan dan Saran

Dari pembahasan yang baru saja diuraikan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembentukan sistem hukum di Indonesia. Kelima sila Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang patut menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam bidang hukum. Pancasila memberikan landasan etika dan normatif bagi perkembangan peraturan perundang-undangan di Indonesia, dengan tujuan menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi semua orang. Namun meskipun Pancasila telah diakui sebagai dasar hukum negara, penerapannya di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain penerapan hukum yang tidak merata, praktik korupsi, dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hukum. Oleh karena itu, untuk mewujudkan cita-cita Pancasila dalam kehidupan hukum, diperlukan upaya terus-menerus dalam melakukan pembenahan sistem hukum, memberantas korupsi, dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum. Dengan komitmen yang kuat dari semua pihak baik pemerintah, penegak hukum dan masyarakat, Pancasila dapat diterapkan secara konsisten dalam kehidupan hukum sehingga tercipta masyarakat yang berkeadilan, kesetaraan, kemakmuran dan kesejahteraan, merupakan landasan dari sila-sila Pancasila.

Daftar Pustaka

- Al Fajri, A., Hasan, R., & Mahfud, A. (2022). Refleksi nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan: Studi kritis perspektif keadilan sosial. *Ma'arif Journal of Education, Madrasah Innovation and Aswaja Studies*, 1(1), 1–11.
- Arief, B. (2019). *Hukum Indonesia: Perkembangan dan tantangan*. Liberty.
- Badruzaman, M. D. (1995). *Hukum dan keadilan sosial*. Alumni.
- Faizin, M. (2022). *Mindfulness dalam Islam: Upaya menumbuhkan kesadaran diri mahasiswa melalui teknik zikir dan perenungan ayat-ayat kauniyah*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. <https://repository.uin-malang.ac.id/12694/>.
- Hidayati, N. (2021). *Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam penegakan hukum Indonesia*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. <https://repository.uin-malang.ac.id/14478/>.

- Salim, H. S., & Azhar, R. P. (2018). Pendidikan hukum di Indonesia. Sinar Grafika.
- Soekarno. (1945). Pancasila sebagai dasar negara. Pustaka Nasional.
- Sjahrir, S. (2020). Pemikiran hukum di Indonesia. Gramedia Pustaka Utama.
- Tim Penyusun. (2005). Pancasila dalam perspektif hukum. Badan Penerbit Universitas Indonesia.
- Yusuf, M. (2020). Korupsi dan tantangan hukum Indonesia: Tinjauan dari perspektif Pancasila. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. <https://repository.uin-malang.ac.id/12911/>.